



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**

### **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan A. Yani Km. 37,5 No 119. Kel.Sungai Paring, Martapura 70613 Kalimantan Selatan  
Tlp (0511) 7218166 Fax (0511) 4772335

<http://disnaker.banjarkab.go.id/E> - mail [nakertrans.banjar@gmail.com](mailto:nakertrans.banjar@gmail.com)

#### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan dan acuan ukuran kinerja atau akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820 );
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  8. Peraturan Presiden tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
  10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Konsideran Pedoman Penetapan Indikator Kinerja untuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Martapura  
Pada Tanggal : 14 Februari 2022



Dr. I Gusti Nyoman Yudiana, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP:19671210 199010 1 001

Lampiran :  
 No : No. 17 Tahun 2022  
 Tanggal : 14 FEBRUARI 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME),KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DIFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	Penanggung jawab	Sumber Data
Fasilitasi Penyediaan Lapangan Kerja Baru	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p><b>Penganggur terbuka</b>, terdiri dari: Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.</p> <p>Adapun Posisi Jumlah Pengangguran pada tahun 2020 berjumlah 12.317 orang, dan angkatan kerja berjumlah 318.371, maka Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,87%</p> <p><b>Tenaga kerja</b> maksudnya adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memnuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat</p> <p><b>Sumber data Tenaga kerja</b> diperoleh dari BPS Laporan Perusahaan</p>	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka sama dengan Jumlah Pengangguran dibagi Jumlah Angkatan Kerja ( <math>TPT = PP / PAK \times 100 \%</math> )</p> <p>Keterangan:            TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)            PP : Jumlah pengangguran (orang)            PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)            untuk jumlah angkatan kerja aktif merujuk pada data statistik tahun terakhir</p>	Kepala Dinas	BPS

<p><b>Fasilitasi penguatan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial serta SDM kawasan Ex. Transmigrasi</b></p>	<p><b>Persentase Kawasan Ex.Transmigrasi Yang Maju</b></p>	<p>DO; desa yg memliki sumber daya sosial dan ekonomi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan, Adapun Jumlah desa ex. transmigrasi berjumlah 19 UPT adalah sebagai berikut :  Kec. Sungai Pinang :1. Kahelaan, 2. Rantau bakula, 3. Rantau angka. 4. Sumber baru, 5. Sumber harapan, 6.Belimbing lama, 7.Belimbing Baru. 8. Hakim Makmur ,:  Kec. Simpang Empat : 1. Galam Rabah I, 2. Galam Rabah II, 3. Galam Rabah III, 4. Galam Rabah IV, 5. Galam Rabah 5, 6. Belanti II , 7. Cintapuri , : Kec. Sungai Tabuk : 1. Riam kanan I : Kec. Aluh-aluh: 1. Tambak Padi, : Kec. Paramasan : 1. Angkipih : Kec. Martapura : 1. Riam Kanan II</p>	<p><b>Jumlah kawasan ex. Transmigrasi yang Maju / Jumlah kawasan ex,transmigrasi keseluruhan x 100%</b></p>	<p>Kepala Dinas</p>	<p>Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja</p>
<p><b>Meningkatnya produktivitas tenaga kerja</b></p>	<p><b>Tingkat Produktivitas Tenaga kerja</b></p>	<p>Tingkat produktivitas Tenaga kerja maksudnya untuk mengetahui besaran upah perjam tenaga kerja Kabupaten Banjar, adapun sebagai dasar perhitungan adalah PDRB Harga Konstan tahun berjalan / Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Banjar / Jumlah jam kerja 1 tahun = 1920 jam ( 1 hari 8 Jam X 4 Minggu X 12 Bulan)  Adapun jumlah PDRB sebesar; Rp. 11.736.080.000.000 , dan jumlah Tenaga Kerja adalah 306.060 orang</p>	<p><b>(PDRB Harga Konstan : Jumlah Tenaga Kerja : Jumlah jam Kerja 1 tahun)</b></p>	<p>Kabid Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>	
<p><b>Meningkatnya kualitas tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi / Non Kompetensi</b></p>	<p><b>Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan / kompetensi</b></p>	<p><b>Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi adalah jumlah Lulusan yang bersertifikat pelatihan atau bersertiikat kompetensi jumlah Lulusan yang bersertifikat pelatihan maksudnya adalah peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan secara tertib, jumlah Lulusan yang bersertiikat kompetensi maksudnya adalah peserta pelatihan yang mengikuti uji kompetensi</b></p>	<p><b>jumlah Peserta Yang Dilatih Pada Tahun N dibagi Jumlah Angka Pengangguran pada Tahun N dikali 100% jumlah yang Dilatih dibagi Angka Pengangguran dikali 100% ( 64 : 12.317 X 100% = 0.52% )</b></p>	<p>Kasi Pelatihan Kerja dan Prodktivitas Tenaga kerja</p>	
<p>Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</p>	<p>Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada thun N</p>	<p>Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada thun N</p>	<p>Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada thun N</p>	<p>Kasi Pelatihan Kerja dan Prodktivitas Tenaga kerja</p>	

Meningkatnya Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas maksudnya adalah perusahaan yang bekerjasama dalam pemagangan tenaga kerja atau perusahaan yang memberikan Bimtek/Diklat kepada karyawannya . jumlah perusahaan pada posisi tahun 2020 yang melaporkan ke disnakertran berjumlah 389 perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas n / jumlah perusahaan yang wajib lapor tahun n X 100%	Kasi Pelatihan Kerja dan Prodktivitas Tenaga kerja	
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas maksudnya adalah perusahaan yang bekerjasama dalam pemagangan tenaga kerja atau perusahaan yang memberikan Bimtek/Diklat kepada karyawannya . jumlah perusahaan pada posisi tahun 2020 yang melaporkan ke disnakertran berjumlah 389 perusahaan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kasi Pelatihan Kerja dan Prodktivitas Tenaga kerja	
Peningkatan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota, dan tenaga kerja mandiri atau berwirausaha baru, serta tenaga kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan.	(Jumlah pencari kerja ( pencari kerja) yang ditempatkan/jumlah pencari kerja yang terdaftar X 100%)	Kabid Penempatan Tenaga Kerja	
Meningkatnya Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar	lowongan kerja atau disebut kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja dan memberikan peluang bagi angkatan kerja untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai sumber daya ekonomi dalam proses produksi untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Disabilitas yang ada di Kabupaten Banjar yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan, adapun jumlah disabilitas sebanyak 804 orang.	Jumlah disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan pada tahun N / jumlah disabilitas seluruhnya pada tahun N X 100%	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	
Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi melalui bursa tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar	Pencari kerja yang mendaftar AK 1	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar pada AK1	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online karir hub	Karir Hub adalah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online yang dikembangkan oleh Kemnaker RI dan juga menggunakan website banjarkerja,	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja baik melalui Job fair maupun Bursa Kerja Khusus (BKK)	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	

Meningkatnya Perlindungan terhadap PMI (Pra dan Purna)	Persentase PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitas Perlindungan	diberikan perlindungan berupa, bekal pengetahuan terkait syarat-syarat bekerja di luar negeri serta terhadap PMI yang mengalami masalah di tempat pekerjaannya.	Jumlah PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitas Perlindungan tahun n dibagi jumlah PMI (Pra dan Purna) yang terdata tahun n	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	CPMI/CTKI adalah Calaan Pekerja Migran Indonesia atau calon Tenaga kerja Indonesia yang memahami persyaratan bekerja ke Luar Negeri dan perlindungan kepada CPMI maupun PMI.yang bertujuan untuk menekan/mengurangi jumlah PMI yang bekerja secara Non Prosudural.	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	PMI/ TKI purna dan keluarga yang dilatih	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	
<b>Persentase Pengesahan RPTKA Perpanjangan Bagi TKA yang Bekerja Dilokasi dalam 1 (satu) Kabupaten</b>	<b>Persentase TKA yang diberikan fasilitas perpanjangan IMTA</b>	Jumlah TKA yang diberikan fasilitas perpanjangan IMTA dibagi TKA yang mengusulkan perpanjangan IMTA	<b>Jumlah TKA yang diberikan fasilitas perpanjangan IMTA dibagi TKA yang mengusulkan perpanjangan IMTA</b>	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	
Meningkatnya Koordinasi Dengan Perusahaan Pemberi Kerja TKA	Persentase Perusahaan yang memperkerjakan TKA	Jumlah Perusahaan yang memperkerjakan TKA / Jumlah Perusahaan keseluruhan	0,5% Thn 2020	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	
<b>Hubungan Industrial yang Harmonis</b>	<b>*Persentase perusahaaa yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ( PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT,Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan</b>	<b>PP adalah Peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan , sedangkan PKB adalah perusahaan yang membuat perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) atau beberapa SP/SB yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak .Struktur upah adalah Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggiatau dari yang tertinggi sampai yang terendah, Skla Upah adalah kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompok jabatan .</b>	<b>(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah perusahaan x 100%)</b>	Kabid Hubungan Industrial	
Meningkatnya kepatuhan Perusahaan terhadap aturan Undang Undang Ketenagakerjaan dan Undang undang Cipta Kerja	Persentase Peraturan perusahaan aktif yang disahkan	Jumlah Perusahaan yang aktif mensahkan peraturan perusahaannya	Jumlah Perusahaan yang aktif mensahkan Peraturan Perusahaannya/jumlah perusahaan x 100%	Kasi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial	
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	Jumlah perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan	Kasi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial	

Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan)	<b>Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial</b> (Jumlah perusahaan yang memahami syarat kerja dalam hubungan kerja (PKWT aktif) dan Jumlah perusahaan yang memiliki PP/PKB dan yang menjadi anggota kepesertaan BPJS	Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial	Kasi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial	
<b>Tersedianya Fasilitas penyelesaian kasus industrial</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Sarana Hubungan Industrial ( PKWT,LKS Bipartit,Serikat Pekerja/Buruh,Organisasi Pengusaha, dan Pekerja yang mendapatkan fasilitas Jamsostek)</b>	<b>Sarana Hubungan Industrial adalah segala sesuatu/wadah yang dipakai sebagai alat penyelesaian</b> Perselisihan Hubungan Industrial, untuk mencapai hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja harmonis, kondusif dan berkeadilan.	<b>Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang Jumlah LKS Bipartit, Jumlah serikat pekerja, Jumlah organisasi pengusaha, jumlah lks Tripartit, jumlah pekerja yang mendapatkan fasilitas jamsostek/ Jumlah Perusahaan x 100%</b>	Kasi Hubungan Industrial	
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang diselesaikan	Perselisihan yang dapat dicegah jika perusahaan mencatatkan Perjanjian Kerja Antar Waktu (PKWT) sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Perusahaan yang mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Kasi Hubungan Industrial	
Terciptanya keselarasan dalam perencanaan tenaga kerja	<b>*Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen</b>	dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	Kabid Penempatan Tenaga Kerja	
<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro/ Mikro</b>	<b>Dokumen perencanaan tenaga kerja untuk jangka menengah</b>	<b>Jumlah Dokumen yang di susun</b>	Kasi Perencanaan Tenaga Kerja	
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen perencanaan tenaga kerja untuk jagka menengah	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kasi Perencanaan Tenaga Kerja	

Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Semakin Tinggi, Memebrikan Gambaran Kinerja dan Mutu Pelayanan ayng Lebih Baik	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>&gt;90 – 100</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt;80 – 90</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt;70 – 80</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt;60 – 70</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&lt;60</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Inntern =</b>  <math>\Sigma (\text{Unsur Kinera Utama} \times 40\%) + (\text{Unsur Kepatuha} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)</math></p>	Kategori	Nilai	Interpretasi	A	>90 – 100	Memuaskan	BB	>80 – 90	Sangat Baik	B	>70 – 80	Baik	CC	>60 – 70	Cukup	C	<60	Kurang	Sekretaris	
Kategori	Nilai	Interpretasi																					
A	>90 – 100	Memuaskan																					
BB	>80 – 90	Sangat Baik																					
B	>70 – 80	Baik																					
CC	>60 – 70	Cukup																					
C	<60	Kurang																					
Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Kasubbag Perencanaan																			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan																			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kasubbag Perencanaan																			
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kasubbag Perencanaan																			
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kasubbag Perencanaan																			

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kasubbag Perencanaan	
tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kasubbag Perencanaan	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan	
<b>Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas</b>	<b>Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu</b>	<b>dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu</b>	<b>100%</b>	Kasubbag Keuangan	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubbag Keuangan	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kasubbag Keuangan	
Terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kasubbag Keuangan	
<b>Lancarnya administrasi kepegawaian daerah</b>	<b>Persentase Adminitrasi Kepegawian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhinya</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kasubbag Umpeg	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kasubbag Umpeg	
<b>Terselenggaranya kegiatan kantor</b>	<b>Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran</b>	<b>Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kasubbag Umpeg	

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umpeg	
Tersedianya Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kasubbag Umpeg	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umpeg	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kasubbag Umpeg	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kasubbag Umpeg	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubbag Umpeg	
<b>Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan</b>	<b>Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan</b>	<b>PersentaseBarang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan</b>	Kasubbag Umpeg	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	Kasubbag Umpeg	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kasubbag Umpeg	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kasubbag Umpeg	
<b>Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi</b>		<b>Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi</b>	Kasubbag Umpeg	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kasubbag Umpeg	

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umpeg	
<b>Kawasan Ex.Transmigrasi Yang Berkembang</b>	<b>Persentase Kawasan Ex.Transmigrasi yang Berkembang</b>	DO; desa yg memiliki sumber daya sosial dan ekonomi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan, Adapun Jumlah desa ex. transmigrasi berjumlah 19 UPT adalah sebagai berikut : Kec. Sungai Pinang :1. Kahelaan, 2. Rantau bakula, 3. Rantau angka. 4. Sumber baru, 5. Sumber harapan, 6.Belimbing lama, 7.Belimbing Baru. 8. Hakim Makmur ;: Kec. Simpang Empat : 1. Galam Rabah I, 2. Galam Rabah II, 3. Galam Rabah III, 4. Galam Rabah IV, 5. Galam Rabah 5, 6. Belanti II , 7. Cintapuri , : Kec. Sungai Tabuk : 1. Riam kanan I : Kec. Aluh-aluh: 1. Tambak Padi, : Kec. Paramasan : 1. Angkipih : Kec. Martapura : 1. Riam Kanan II	<b>Jumlah kawasan ex. Transmigrasi yang Maju / Jumlah kawasan ex,transmigrasi keseluruhan x 100%</b>	Kabid Pelatihan dan Produktivitas tenaga Kerja	
<b>Terfasilitasinya Penguatan Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Serta Meningkatnya Kualitas SDM Kawasan Ex. Transmigrasi</b>	<b>Jumlah Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian</b>	Kawasan Ex. Transimigarsi yang berkembang maksudnya adalah Desa potensial menjadi maju, yang memiliki sumber daya sosial,ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimall untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan Adapun Jumlah desa ex. transmigrasi berjumlah 19 UPT adalah sebagai berikut : Kec. Sungai Pinang :1. Kahelaan, 2. Rantau bakula, 3. Rantau angka. 4. Sumber baru, 5. Sumber harapan, 6.Belimbing lama, 7.Belimbing Baru. 8. Hakim Makmur ;: Kec. Simpang Empat : 1. Galam Rabah I, 2. Galam Rabah II, 3. Galam Rabah III, 4. Galam Rabah IV, 5. Galam Rabah 5, 6. Belanti II , 7. Cintapuri , : Kec. Sungai Tabuk : 1. Riam kanan I : Kec. Aluh-aluh: 1. Tambak Padi, : Kec. Paramasan : 1. Angkipih : Kec. Martapura : 1. Riam Kanan II	<b>Jumlah kawasan ex. Transmigrasi yang berkembang / Jumlah kawasan ex,transmigrasi keseluruhan x 100%</b>	Kasi Transmigrasi	
Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Pemantapan Satuan Pemukiman Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	Kasi Transmigrasi	

Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Wilayah Ex.Transmigrasi yang terfasilitasi penguatan infrastruktur sosial , ekonomi	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi dan Kelembagaan	Kasi Transmigrasi	
--	---	---	--	-------------------	--

Ditetapkan di : Martapura  
Pada Tanggal : 14 Pebruari 2022



Dr. I Gusti Nyoman Yudiana, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP:19671210 199010 1 001